

Perspektif *Middle Power* Indonesia dalam Kerja Sama Kendaraan Listrik dengan Tiongkok (2019–2026)

Asep Setiawan¹, Hamka², Latifah³, Indah Eka Priyanto⁴, Danu Prasetyo⁵

¹Master's Program in Political Science, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

²Political Science Program, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

³Public Administration Program, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

⁴Political Science Program, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

⁵Master's Program in Political Science, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email Korespondensi: asep.setiawan@umj.ac.id

Diterima: 20-007-2026 | Disetujui: 04-09-2026 | Diterbitkan: 06-09-2026

ABSTRACT

This article examines Indonesia's autonomy strategy regarding electric vehicle (EV) sector cooperation with China during the 2019–2026 period, focusing on the Prabowo Subianto administration (2024–2026). Although Indonesia has successfully attracted over USD 30 billion in investment, the dominance of Chinese capital—controlling more than 65% of the national EV value chain—raises questions about the sustainability of Jakarta's autonomy strategy within this asymmetric relationship. The study employs an integrated theoretical framework—combining middle power theory, the Strategic Autonomous Framework, and two-level game theory—alongside a single case study design using a qualitative approach. Secondary data, comprising policy documents, international agency reports, and peer-reviewed journal articles from 2019–2026, were analyzed using interpretive policy analysis. The findings reveal that Indonesia's autonomy strategy is domain-specific and multi-layered: formally strong across all policy domains and substantively strong at the macro-policy level and in the vehicle assembly segment, yet structurally weak in the highly strategic battery cell segment. This article introduces the concept of "instrumental multilateralism" as a specific middle-power mechanism for managing bilateral asymmetry and offers empirically calibrated policy recommendations for Indonesia and other Global South nations.

Keywords: *autonomy strategy; instrumental multilateralism; middle power; electric vehicles; nickel downstreaming; Indonesia–China relations; economic diplomacy*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis otonomi strategis Indonesia dalam kerja sama sektor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan Tiongkok pada periode 2019–2026, dengan fokus pada masa pemerintahan Prabowo Subianto (2024–2026). Meskipun Indonesia berhasil menarik lebih dari USD 30 miliar investasi, dominasi modal Tiongkok yang menguasai lebih dari 65% rantai nilai EV nasional menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana otonomi strategis Jakarta dapat dipertahankan dalam hubungan asimetris tersebut. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yang diintegrasikan secara terpadu—*middle power theory*, *strategic autonomy framework*, dan *two-level game theory*—serta desain studi kasus tunggal (*single-country case study*) dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan lembaga internasional, dan artikel jurnal peer-review periode 2019–2026 dianalisis melalui *interpretive policy analysis*. Temuan menunjukkan bahwa otonomi strategis Indonesia bersifat domain-spesifik dan bertingkat: kuat secara formal di seluruh domain kebijakan, kuat secara substantif pada tataran

kebijakan makro dan segmen perakitan kendaraan, namun lemah secara struktural pada segmen sel baterai yang paling strategis. Artikel ini memperkenalkan konsep *instrumental multilateralisme* sebagai mekanisme spesifik kekuatan menengah dalam mengelola asimetri bilateral dan memberikan rekomendasi kebijakan yang terkalibrasi secara empiris bagi Indonesia dan negara-negara Global South lain.

Kata kunci: otonomi strategis; instrumental multilateralisme; kekuatan menengah; kendaraan listrik; hilirisasi nikel; hubungan Indonesia–Tiongkok; diplomasi ekonomi

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Setiawan, A., Hamka, H., Latifah, L., Priyanto, I. E. ., & Prasetyo, D. (2026). Perspektif Middle Power Indonesia dalam Kerja Sama Kendaraan Listrik dengan Tiongkok (2019–2026). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 3695-3705. <https://doi.org/10.63822/z5snp37>

PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi struktural yang semakin krusial dalam lanskap transisi energi global abad ke-21. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia—sekitar 38% dari total cadangan global (Szurlies & Vasters, 2024; U.S. Geological Survey, 2025)—Indonesia menjadi simpul sentral dalam rantai nilai baterai lithium global dan, oleh karenanya, dalam kerja sama industri kendaraan listrik internasional. Sejak diterapkannya kebijakan hilirisasi nikel secara penuh pada Januari 2020 melalui pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah, nilai ekspor berbasis nikel melonjak dari USD 6 miliar menjadi USD 30 miliar. Investasi dari perusahaan-perusahaan berbasis di Tiongkok menjadi mesin utama transformasi ini, dengan lebih dari USD 30 miliar tertanam dalam proyek-proyek smelter, pabrik sel baterai, dan fasilitas perakitan kendaraan (Korinek & De, 2023; Soamole & Mokodompit, 2025; Tritto, 2023).

Permasalahan muncul dari struktur ketergantungan yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Ketika modal dan teknologi Tiongkok menguasai lebih dari 65% rantai nilai EV nasional dan teknologi inti sel baterai tetap berada di bawah kontrol eksklusif perusahaan-perusahaan Tiongkok, otonomi strategis Indonesia—yakni kapasitas aktual untuk mengimplementasikan pilihan kebijakan tanpa pengaruh determinatif dari mitra yang lebih kuat—menjadi dipertanyakan. Kekalahan Indonesia dalam sengketa WTO DS592 dengan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel—di mana Panel WTO memutuskan bahwa Indonesia melanggar Article XI:1 GATT 1994 dan tidak dapat dibenarkan oleh Articles XI:2(a) maupun XX GATT 1994 (Febiola et al., 2024; Mernissi et al., 2024; Sudiana et al., Dermawan, & Lanti, 2025)—memperlihatkan kontradiksi antara nasionalisme sumber daya dan tatanan perdagangan berbasis aturan.

Kondisi ini semakin kompleks pada masa pemerintahan Prabowo Subianto sejak Oktober 2024. Di bawah pemerintahan tersebut, politik luar negeri Indonesia dilaporkan telah bergeser dari pendekatan ekonomi-pragmatis era Jokowi menuju strategi yang lebih komprehensif dengan integrasi dimensi keamanan dan pertahanan (Karalekas, 2025; Yadav, 2025). Analisis Proximity Index menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok semakin meningkat meskipun hubungan militer tetap berlabuh ke Amerika Serikat melalui pola double hedging (Anwar & Eldo, 2025; Anwar, 2022; Haryudi et al., 2025; Nasution & Dermawan, 2026). Medan diplomatik yang harus dikelola mencakup empat dimensi simultan: memaksimalkan manfaat pengembangan sektor EV, mempertahankan otonomi strategis, memenuhi aspirations kekuatan menengah global, dan merespons kompetisi AS–Tiongkok yang semakin intensif di kawasan Indo-Pasifik.

Studi-studi yang ada tentang kerja sama EV Indonesia–Tiongkok dapat dikelompokkan ke dalam dua klaster analisis yang sering berjalan tanpa saling menyapa. Klaster pertama mengkaji dimensi ekonomi-investasi melalui analisis tentang investasi dan perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam industri smelter nikel (Fan & Yuliatiningtyas, 2025; Mulyono et al., 2025; Riyanto et al., 2023), dampak kebijakan hilirisasi terhadap struktur ekonomi domestik (Agung & Adi, 2022; Fahik et al., 2024; Natus et al., 2024; Sahl & Djati, 2025; Santoso et al., 2023), serta dinamika permintaan dan penawaran EV di pasar domestik (Adzhani et al., 2025; Ardiyanti et al., 2023; Ariyani et al., 2023; Candra, 2022; Li & Setiowati, 2023). Klaster kedua mengkaji dimensi politik-keamanan melalui analisis relasi bilateral dan persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik (Anwar, 2022; Kuik, 2022). Keduanya belum diintegrasikan dalam kerangka analitik yang mampu menjelaskan mengapa otonomi strategis Indonesia bersifat parsial dan bagaimana hal tersebut dibentuk oleh interaksi tingkat domestik dan internasional.

Tujuan penelitian ini adalah menjawab dua pertanyaan utama: ** bagaimana otonomi strategis

Indonesia terbentuk, dipertahankan, atau terancam dalam kerja sama EV dengan Tiongkok pada periode 2019–2026? ** seberapa efektif instrumen kebijakan yang digunakan Indonesia—khususnya hilirisasi nikel dan diversifikasi mitra—dalam mempertahankan otonomi strategis pada konteks hubungan asimetris dengan kekuatan besar? Secara teoretis, artikel ini memperkenalkan konsep instrumental multilateralisme sebagai mekanisme spesifik kekuatan menengah dalam mengelola asimetri bilateral dan mengintegrasikan tiga kerangka teori yang selama ini digunakan secara terpisah.

TINJAUAN PUSTAKA

Artikel ini berada pada persimpangan empat perdebatan yang aktif dalam bidang Hubungan Internasional. Pertama, perdebatan tentang kapasitas middle power dalam menavigasi hubungan asimetris dengan kekuatan besar. Literatur tentang kekuatan menengah telah lama membedakan antara traditional dan emerging middle powers berdasarkan perbedaan konstitutif (tradisi demokratis, waktu kemunculan, posisi dalam ekonomi dunia, pengaruh regional) serta perilaku (orientasi regional, kerja sama integratif, konstruksi identitas internasional) (Black & Hornsby, 2016; Hamill & Lee, 2001; Smith, 2017; Westhuizen, 1998). Kerangka ini telah diaplikasikan secara eksplanatif untuk konteks Indonesia sebagai kekuatan menengah yang menjalankan hedging plus di Indo-Pasifik (Anwar, 2022; Arkananta, 2025; Iksan & Soong, 2022; Rahmanillah et al., 2023). Namun, kemampuan aktual kekuatan menengah Global South dalam menavigasi hubungan asimetris dalam sektor teknologi tinggi dan sumber daya kritis masih kurang dieksplorasi.

Kedua, perdebatan tentang efektivitas resource nationalism dan kebijakan hilirisasi berbasis sumber daya sebagai instrumen kedaulatan ekonomi di era transisi energi. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa hilirisasi Indonesia bersifat transformatif tetapi kontra-produktif secara jangka panjang dalam beberapa dimensi (Lahadalia, Wijaya, Dartanto, & Subroto, 2024; Soamole & Mokodompit, 2025). Ketiga, perdebatan tentang manajemen kompetisi kekuatan besar melalui hedging dan institutional balancing. Keempat, perdebatan tentang relevansi konsep otonomi strategis untuk negara-negara emerging markets di luar konteks Eropa (Womack, 2016; Ruggie, 1993).

Kerangka Teori

Teori kekuatan menengah menjelaskan posisi struktural dan repertoar strategi yang tersedia bagi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya untuk bertindak sebagai kekuatan besar maupun ditempatkan sebagai small powers (Cooper, Higgott, & Nossal, 1993; Jordaan, 2003). Kekuatan menengah seperti Indonesia memiliki ciri: (a) kapasitas untuk membangun koalisi isu-spesifik (niche diplomacy; Cooper, 1997); (b) preferensi untuk bekerja dalam kerangka multilateral sebagai mekanisme pengaruh; dan (c) keterampilan untuk memformulasikan kebijakan luar negeri yang fleksibel di antara kekuatan besar. Dalam konteks kerja sama EV, teori ini memprediksi bahwa Indonesia akan menggunakan kemampuan nichenya atas sumber daya nikel untuk memperoleh ruang otonomi melalui diplomasi multilateral dan bilateral secara simultan.

Strategic Autonomy Framework menganalisis sejauh mana negara mempertahankan kemandirian kebijakan yang bermakna dalam menghadapi tekanan dependensi struktural (Ruggie, 1993; Womack, 2016). Womack membedakan dua dimensi otonomi yang secara analitis krusial: (a) otonomi formal, yaitu kemampuan nominal untuk membuat keputusan kebijakan independen; dan (b) otonomi substantif, yaitu

kapasitas aktual untuk mengimplementasikan pilihan kebijakan yang mencerminkan preferensi domestik tanpa pengaruh determinatif dari mitra yang lebih kuat. Distinsi ini sangat relevan untuk menganalisis kondisi Indonesia karena memungkinkan identifikasi dimensi-dimensi spesifik di mana otonomi strategis terancam oleh konsentrasi modal Tiongkok, sekaligus dimensi-dimensi di mana kemandirian bermakna berhasil dipertahankan.

Two-Level Game Theory menjelaskan dinamika interaksi domestik-internasional yang membentuk win-set negosiasi. Konsep win-set, yaitu rentang kesepakatan yang dapat diterima di tingkat domestik, sangat relevan: semakin luas win-set domestik, semakin besar fleksibilitas diplomatik di Level I (internasional). Pada era Prabowo, koherensi kepentingan antara industrialis, serikat buruh, dan nasionalis memberikan win-set yang luas untuk kerja sama EV dengan Tiongkok. Namun, win-set yang luas ini justru dapat menciptakan rigiditas diplomatik, karena Indonesia tidak dapat dengan mudah memodifikasi kebijakan larangan ekspor tanpa biaya domestik yang besar (Putnam, 1988; Keohane & Nye, 1977).

Artikel ini memperkenalkan konsep instrumental multilateralisme sebagai mekanisme spesifik kekuatan menengah dalam mengelola asimetri bilateral. Konsep ini melampaui gagasan multilateral engagement yang lebih umum dengan menegaskan bahwa kekuatan menengah tidak hanya berpartisipasi dalam multilateralisme, tetapi menggunakannya secara strategis untuk memperkuat agenda ekonomi nasional—bukan sekadar partisipasi simbolis. Strategi ini dimotivasi oleh kepentingan bilateral yang konkret dan strategis, di mana forum internasional dipilih berdasarkan kemampuannya memperkuat agenda ekonomi nasional (Kuik, 2022; Park, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single-country case study) pada Indonesia, dilengkapi dengan referensi komparatif terhadap kebijakan kendaraan listrik Malaysia sebagai kasus kontras. Desain ini dipilih karena kesesuaiannya dengan sifat eksplanatif-analitis penelitian: menjelaskan mengapa dan bagaimana otonomi strategis Indonesia terbentuk, dipertahankan, atau terancam dalam konteks kerja sama EV dengan Tiongkok, dengan kerangka waktu 2019 (berlakunya Perpres No. 55/2019) hingga pertengahan 2026 (Yin, 2018; Lijphart, 1971).

Penelitian bersifat eksplanatif-analitis dengan cakupan temporal 2019–2026, sehingga mampu menangkap transisi dari kebijakan era Jokowi menuju kebijakan era Prabowo Subianto.

Data bersumber dari dokumen kebijakan, laporan lembaga think tank internasional, dan artikel jurnal peer-review. Kriteria seleksi dokumen mencakup: (a) relevansi substantif dengan topik kerja sama EV Indonesia–Tiongkok dan otonomi strategis; (b) kredibilitas sumber—dokumen pemerintah resmi, laporan lembaga bereputasi internasional, dan artikel jurnal terindeks; (c) aktualitas—diprioritaskan dokumen 2022–2026; dan (d) ketersediaan verifikasi—seluruh sumber dapat diverifikasi secara independen.

Data dianalisis menggunakan interpretive policy analysis, berfokus pada bagaimana otonomi strategis dikonstruksi secara diskursif dan dipraktikkan secara operasional dalam tata kelola EV Indonesia. Analisis melibatkan empat prosedur: identifikasi policy frames yang digunakan pejabat Indonesia untuk mengonstruksi hubungan EV dengan Tiongkok; analisis ketegangan antara doktrin non-keberpihakan dan realitas struktur investasi; evaluasi efektivitas instrumen-instrumen kebijakan spesifik dalam mencapai otonomi strategis; dan analisis komparatif dengan respons Malaysia untuk mengidentifikasi variabel

penjelas perbedaan outcome.

Validitas konstruk diperkuat melalui penggunaan konsep-konsep yang bersumber dari teori HI yang mapan dan operasionalisasi yang transparan. Kredibilitas temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan member-checking dengan literatur akademik. Transferabilitas diperkuat melalui analisis critical case yang menghasilkan wawasan relevan untuk kasus-kasus serupa di Global South. Limitasi penelitian: berbasis data sekunder tidak dapat menangkap dinamika negosiasi behind-the-scenes; pemerintahan Prabowo yang baru berjalan sejak Oktober 2024 menyebabkan data longitudinal masih terbatas; data transfer teknologi aktual sangat terbatas; perspektif Tiongkok kurang terwakili karena keterbatasan dokumen berbahasa Mandarin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Dominasi Modal Tiongkok: Struktur Ketergantungan Asimetris

Analisis terhadap data empiris menggambarkan konsentrasi modal Tiongkok yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ekosistem EV Indonesia. Di segmen hulu (pengolahan nikel), Tsingshan Group melalui Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah telah menjadi salah satu kompleks industri nikel terbesar di dunia, menjadi tuan rumah bagi produksi nikel olahan Indonesia yang melonjak dari 24.000 ton metrik menjadi 636.000 ton metrik (Tritto, 2023; Soamole & Mokodompit, 2025).

Di segmen sel baterai, konsentrasi-modal Tiongkok semakin dominan. Namun, perusahaan-perusahaan baterai ini mempertahankan kontrol eksklusif atas teknologi inti dan kekayaan intelektual, sementara Indonesia terutama berkontribusi dalam bentuk bahan baku nikel, lahan, dan fasilitas (Lahadalia et al., 2024; Karim, 2025). Di segmen hilir (perakitan), BYD memulai konstruksi pabrik senilai USD 1,3 miliar di Subang dengan kapasitas proyeksi 150.000 unit per tahun dan target operasional pada Januari 2026. Investasi berskala besar ini menambah portofolio perusahaan Tiongkok seperti Wuling, Geely, dan Chery yang telah beroperasi sebelumnya di Indonesia.

Menggunakan kerangka ketergantungan asimetris Womack dan teori interdependence Keohane dan Nye, kondisi ini mencerminkan empat dimensi ketergantungan struktural:

Tabel 1 Dimensi Ketergantungan Struktural

Dimensi	Manifestasi dalam Ekosistem EV Indonesia
Ketergantungan teknologi	Tidak adanya kapasitas sel baterai domestik yang independen
Ketergantungan pasar	Konsentrasi ekspor nikel ke Tiongkok sebagai konsumen dominan
Ketergantungan modal	Absennya alternatif investor skala besar di segmen baterai
Ketergantungan standar	Ekosistem baterai dikembangkan sesuai standar teknis Tiongkok

Sumber: Diolah Penulis

Dampak keempat dimensi ini signifikan: ekosistem baterai yang dikembangkan sesuai standar teknis Tiongkok mempersulit integrasi dengan rantai pasokan non-Tiongkok di masa depan, sehingga menciptakan lock-in struktural (Keohane & Nye, 1977; Womack, 2016).

Kebijakan Hilirisasi Nikel: Efektivitas Diplomasi Ekonomi dan Batas-Batasnya

Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia—diperkenalkan bertahap sejak 2014 dan diberlakukan penuh

pada Januari 2020—telah terbukti sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang transformatif namun tidak tanpa kontradiksi struktural. Nilai ekspor berbasis nikel melonjak lima kali lipat dari USD 6 miliar menjadi USD 30 miliar. Namun, Indonesia hanya menangkap kurang dari 15% nilai ekonomi total dari nikelnya dalam produk EV final—angka ini menunjukkan bahwa keuntungan terbesar masih dinikmati oleh perusahaan-perusahaan di hulu dan hilir rantai nilai yang berbasis di luar negeri.

Dari perspektif two-level game, keberhasilan politik domestik kebijakan hilirisasi—koherensi kepentingan antara industrialis, serikat buruh, dan nasionalis—justru menciptakan rigiditas diplomatik. Lebih lanjut, kekalahan dalam sengketa WTO DS592 menciptakan kerentanan hukum internasional yang dapat dieksploitasi oleh mitra dagang lain (Mernissi et al., 2024; Febiola et al., 2024). Putusan WTO yang merugikan dapat menurunkan dampak kebijakan sebesar 60–70%. Dengan demikian, hilirisasi nikel membuktikan dirinya sebagai instrumen niche diplomacy yang efektif dalam window kesempatan tertentu, namun rentan terhadap perubahan aturan permainan internasional.

Diversifikasi Mitra dan Eksistensi Strategic Gap

Indonesia telah menunjukkan keberhasilan dalam menarik investasi signifikan dari mitra non-Tiongkok. Investasi Hyundai senilai USD 1,55 miliar dan kolaborasi dengan konsorsium Korea Selatan dalam pembangunan pabrik baterai sel di Karawang menggambarkan keberhasilan diversifikasi parsial. Namun, analisis mendalam menunjukkan adanya ketimpangan struktural: investasi dari Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat cenderung terkonsentrasi pada segmen manufaktur hilir atau perakitan kendaraan.

Celah strategis ini—di mana Indonesia memiliki otonomi substansial pada perakitan namun ketergantungan struktural pada teknologi inti—merupakan konsekuensi dari positioning industri masing-masing negara. Tiongkok memiliki keunggulan kompetitif pada teknologi dan skala produksi baterai, sementara Korea Selatan, Jepang, dan AS memiliki portofolio yang lebih kuat pada perakitan kendaraan dan komponen bernilai tambah tinggi non-baterai. Ketidakmampuan untuk mengoptimalkan kedalaman investasi sekaligus diversifikasi mitra secara simultan menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan penguatan kebijakan konten lokal dan diplomasi ekonomi yang lebih agresif untuk menutup celah strategis tersebut (Arkananta, 2025; Korinek & De, 2023).

Instrumental Multilateralisme sebagai Strategi Mitigasi Asimetri

Dalam merespons struktur ketergantungan ini, Indonesia menerapkan strategi instrumental multilateralisme yang beroperasi pada beberapa tingkatan:

Pertama, pada tingkat bilateral, Indonesia menggunakan forum bilateral Indonesia–Tiongkok untuk mengartikulasikan kepentingan hilirisasi sebagai agenda bersama, bukan sebagai kebijakan sepihak.

Kedua, pada tingkat regional, Indonesia menggunakan platform ASEAN untuk mengartikulasikan kepentingan EV sebagai agenda kawasan dalam konteks kompetisi kekuatan besar. Penggunaan forum IPEF untuk kerja sama dengan mitra non-Tiongkok merupakan manifestasi konkret dari strategi ini.

Ketiga, pada tingkat global, Indonesia secara selektif menggunakan forum multilateral untuk memperkuat legitimasi kebijakan hilirisasi dan memperoleh ruang manuver kebijakan—misalnya melalui forum transisi energi internasional. Penggunaan IMF dan World Bank sebagai sumber data tentang dampak kebijakan hilirisasi juga menjadi instrumen untuk membangun narasi kebijakan berbasis bukti.

Strategi ini berbeda dari keterlibatan multilateral konvensional karena sifatnya yang instrumental—

dimotivasi oleh kepentingan bilateral yang konkret—dan strategis, di mana forum internasional dipilih berdasarkan kemampuannya memperkuat agenda ekonomi nasional, bukan sekadar partisipasi simbolis (Kuik, 2022; Park, 2022). Berdasarkan analisis di atas, otonomi strategis Indonesia dapat disintesis ke dalam tabel berikut:

Tabel 2 Distingsi Otonomi Formal dan Substantif: Tabel Sintesis

Domain	Otonomi Formal	Otonomi Substantif
Perumusan kebijakan makro (Perpres 55/2019, PP 43/2023)	Kuat	Kuat
Segmen perakitan kendaraan	Kuat	Kuat
Regulasi konten lokal dan TKDN	Kuat	Sedang
Segmen sel baterai (konsorsium IBC-CATL, HLI, dll.)	Kuat	Lemah
Standar teknis baterai	Kuat	Sangat lemah

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel ini menunjukkan bahwa otonomi Indonesia kuat secara formal di semua domain kebijakan, kuat secara substantif di tataran kebijakan makro dan segmen perakitan kendaraan, namun secara struktural lemah di segmen sel baterai yang secara strategis paling kritis—di mana modal Tiongkok mengontrol lebih dari 65% rantai nilai EV nasional dan teknologi inti baterai tetap berada di bawah kontrol eksklusif perusahaan-perusahaan Tiongkok.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap data empiris dan dokumen kebijakan 2019–2026, terdapat empat temuan utama yang menjawab kedua pertanyaan penelitian secara langsung:

Pertama, otonomi strategis Indonesia dalam kerja sama EV dengan Tiongkok bersifat domain-spesifik dan bertingkat. Distingsi Womack antara otonomi formal dan substantif menunjukkan bahwa otonomi Indonesia kuat secara formal di seluruh domain kebijakan, kuat secara substantif pada tataran kebijakan makro dan segmen perakitan, namun secara struktural lemah pada segmen sel baterai yang paling strategis.

Kedua, kebijakan hilirisasi nikel sebagai instrumen *niche diplomacy* telah terbukti transformatif namun mengandung kontradiksi struktural yang signifikan. Lonjakan nilai ekspor lima kali lipat dalam lima tahun disertai dengan captive value kurang dari 15% dalam produk EV final—angka yang menunjukkan ketergantungan pada teknologi dan modal asing yang belum terputus.

Ketiga, diversifikasi mitra berhasil mengurangi dominasi modal Tiongkok di segmen perakitan, namun belum mampu menjangkau segmen sel baterai yang paling strategis. *Celah strategis* dalam kemitraan dengan Korea Selatan, Jepang, dan AS membatasi efektivitas diversifikasi sebagai instrumen otonomi.

Keempat, *instrumental multilateralisme* merupakan mekanisme spesifik yang digunakan Indonesia untuk mengelola asimetri bilateral dalam kerja sama EV. Konsep ini melampaui partisipasi multilateral konvensional dengan menjadikan forum internasional sebagai instrumen strategis untuk memperkuat agenda ekonomi nasional.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya literatur *middle power agency* dengan tiga kontribusi: model otonomi strategis *domain-spesifik* yang membedakan tingkat kemandirian per segmen rantai nilai; konsep *instrumental multilateralisme* sebagai mekanisme spesifik yang dapat diteliti dan direplikasi; dan integrasi terpadu *middle power theory*, *strategic autonomy framework*, dan *two-level game theory* dalam konteks diplomasi sumber daya dan kerja sama EV bilateral (Waltz, 1979; Wendt, 1999).

Artikel ini menghasilkan tiga rekomendasi kebijakan yang terkalibrasi secara empiris untuk era Prabowo 2024–2026:

1. **Penguatan kapasitas teknologi baterai domestik melalui kemitraan multi-mitra yang terdiferensiasi per segmen.** Indonesia perlu membangun kapasitas R&D baterai secara paralel di tiga jalur: teknologi LFP dengan konsorsium Korea Selatan, teknologi NMC melalui kemitraan dengan Jepang, dan pengembangan material katoda domestik. Pendekatan *multi-track* ini mengurangi ketergantungan pada satu ekosistem teknologi.
2. **Negosiasi sistematis *technology transfer clause* dalam setiap kontrak investasi baterai.** Berdasarkan analisis bahwa teknologi inti baterai masih berada di bawah kontrol eksklusif perusahaan-perusahaan Tiongkok, Indonesia perlu memasukkan klausul transfer teknologi yang mengikat sebagai syarat untuk setiap konsesi investasi pada segmen baterai—bukan sekadar perakitan kendaraan.
3. **Penggunaan forum multilateral selektif untuk membangun konsorsium regulasi baterai regional ASEAN.** Dalam kerangka instrumental multilateralisme, Indonesia dapat menggunakan platform ASEAN untuk membangun standar baterai regional yang tidak bergantung pada standar teknis Tiongkok, sehingga membuka ruang integrasi dengan rantai pasokan non-Tiongkok di masa depan (Karalekas, 2025; Yadav, 2025; Walker & Palaon, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Adzhani, I. A., Pramono, B., Santoso, M. S., Wirayat, M. Y. F., Okdinawati, L., & Belgiawan, P. F. (2025). Battery electric vehicle adoption in Indonesia: Insights from consumer preferences and stakeholder perspectives. *Journal of the Civil Engineering Forum*, 11(3), 324–340. <https://doi.org/10.22146/jcef.22067>
- Agung, M., & Adi, E. A. W. (2022). Peningkatan investasi dan hilirisasi nikel di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2), 4009–4020. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3085>
- Amaliyah, R. (2026). Chinese investment, social relations, and local actors: The case of IMIP in Central Sulawesi. *WIMAYA*, 6(2), 149–160. <https://doi.org/10.33005/wimaya.v6i02.376>
- Anwar, A., & Eldo, D. H. A. P. (2025). Kedekatan strategis Indonesia dalam rivalitas AS–Cina pasca COVID-19. *Jurnal Dinamika Global*, 10(2), 305–331. <https://doi.org/10.36859/jdg.v10i2.4643>
- Anwar, D. F. (2023). Indonesia's hedging plus policy in the face of China's rise and the US–China rivalry in the Indo-Pacific region. *The Pacific Review*, 36(2), 351–377. <https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160794>
- Ardiyanti, D., Kurniawan, F., Raokter, U., & Wikansari, R. (2023). Analisis penjualan mobil listrik di Indonesia dalam rentang waktu 2020–2023. *ECOMA: Journal of Economics and Management*, 1(3), 134–144. <https://doi.org/10.55681/ecoma.v1i3.26>
- Ariyani, L., Dinaseviani, A., Rosadi, A. H. Y., Febrianda, R., Hermawati, W., & Aminullah, E. (2023). Challenges in connecting the elements of sectoral system of innovation for developing electric vehicle industry in Indonesia. *STI Policy and Management Journal*, 8(2), 119–144. <https://doi.org/10.14203/STIPM.2023.383>

- Arkananta, H. (2025). Middle-power geoeconomics: Indonesia's economic diplomacy in the EV battery value chain between China and the EU. *Politeia: Journal of Public Administration, Political Science and International Relations*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.61978/politeia.v3i1.517>
- Cooper, A. F. (1997). Niche diplomacy: A conceptual overview. In A. F. Cooper (Ed.), *Niche diplomacy: Middle powers after the Cold War* (pp. 1–24). Macmillan.
- Cooper, A. F., Higgott, R. A., & Nossal, K. R. (1993). *Relocating middle powers: Australia and Canada in a changing world order*. University of British Columbia Press.
- Efstathiopoulos, C. (2023). Global IR and the middle power concept: Exploring different paths to agency. *Australian Journal of International Affairs*, 77(2), 213–232. <https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2191925>
- Fahik, P. R., Putri, A. D. S., & Raharyo, A. (2024). Nickel downstream and Indonesia's economic diplomacy towards China. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 16(2), 40–53. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v16i2.10799>
- Febiola, C. P., Pratiwi, C. A., Salsabila, R. A., & Bramantyo, A. (2024). Nickel ore export prohibition in the framework of the World Trade Organization as an effort to protect natural resources: WTO case study DS592—Indonesia—Measures relating to raw materials. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 12(3), 444–455. <https://doi.org/10.36987/jiad.v12i3.6223>
- Hamill, J., & Lee, D. (2001). A middle power paradox? South African diplomacy in the post-apartheid era. *International Relations*, 15(4), 33–59. <https://doi.org/10.1177/004711701015004004>
- Haryudi, H., Hadianto, M., & Risman, H. (2025). Indonesia's defense strategy in the South China Sea: Balancing sovereignty, security, and diplomacy amid China's expansion. *Formosa Journal of Science and Technology*, 4(3). <https://doi.org/10.55927/fjst.v4i3.34>
- Iksan, M., & Soong, J.-J. (2023). The political economy of Indonesia's development strategy under China—USA power rivalry and hegemonic competition: A middle power with its hedging strategy. *The Chinese Economy*, 56(4), 304–320. <https://doi.org/10.1080/10971475.2022.2136696>
- Jordaan, E. (2003). The concept of a middle power in international relations: Distinguishing between emerging and traditional middle powers. *Politikon*, 30(2), 165–181. <https://doi.org/10.1080/0258934032000147282>
- Karim, M. F. (2025). Chinese network power and patronage embeddedness in Indonesia. *Asia Europe Journal*, 23, 285–302. <https://doi.org/10.1007/s10308-025-00717-4>
- Kee, H. L., & Xie, E. (2025). *Nickel, steel and cars: Export ban and domestic value-added in Indonesia* (Policy Research Working Paper No. 11249). World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-11249>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and interdependence: World politics in transition*. Little, Brown.
- Korinek, J., & De Sa, P. (2024). Local content policies in the mining sector. In L. Y. Ing & G. M. Grossman (Eds.), *Local content requirements: Promises and pitfalls* (pp. 48–86). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003415794-3>
- Kuik, C.-C. (2022). Hedging via institutions: ASEAN-led multilateralism in the age of the Indo-Pacific. *Asian Journal of Peacebuilding*, 10(2), 355–386. <https://doi.org/10.18588/202211.00a319>
- Lahadalia, B., Wijaya, C., Dartanto, T., & Subroto, A. (2024). Nickel downstreaming in Indonesia: Reinventing sustainable industrial policy and developmental state in building the EV industry in ASEAN. *Journal of ASEAN Studies*, 12(1), 79–106. <https://doi.org/10.21512/jas.v12i1.11128>
- Li, K. Z. (2025, August 27). *Indonesia's energy transition: Exercising strategic agency in partnership with China*. Asia Society Policy Institute. <https://asiasociety.org/policy-institute/indonesias-energy-transition-exercising-strategic-agency-partnership-china>
- Li, X. X., & Setiowati, R. (2023). The influence of country of origin, brand awareness, perceived risk and brand image on purchase intention on China Wuling Air electric vehicles. *Open Journal of Applied Sciences*, 13(5), 618–635. <https://doi.org/10.4236/ojapps.2023.135049>

- Lijphart, A. (1971). Comparative politics and the comparative method. *American Political Science Review*, 65(3), 682–693. <https://doi.org/10.2307/1955513>
- Mernissi, Z., Risnain, M., & Pitaloka, D. (2024). Analysis of the World Trade Organization panel decision between Indonesia and the European Union in case number DS592 of 2022 concerning restrictions on exports of low-grade nickel ore. *Mataram Journal of International Law*, 1(2), 175–195. <https://doi.org/10.29303/majil.v1i2.4221>
- Morgenthau, H. J. (1978). *Politics among nations: The struggle for power and peace* (5th ed.). Alfred A. Knopf.
- Noviantika, T. (2025). The impact of the WTO Dispute Settlement Body decision on Indonesia and European Union export ban dispute: A case study of nickel raw material export restrictions. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 22(2), 137–146. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v22i2.1248>
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. *International Organization*, 42(3), 427–460. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027697>
- Rahmanillah, A. R., Bastian, T. P., & Ihsan, R. (2023). Indonesia's South China Sea policy: The limits of hedging. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(11), 1279–1291. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i11.177>
- Ruggie, J. G. (1992). Multilateralism: The anatomy of an institution. *International Organization*, 46(3), 561–598. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027831>
- Smith, K. (2018). Reshaping international relations: Theoretical innovations from Africa. *All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace*, 7(2), 81–92. <https://doi.org/10.20991/allazimuth.335811>
- Soamole, S. B., & Mokodompit, E. A. (2025). Indonesia's nickel downstreaming in the geopolitics of the global EV battery industry: A political economy and scenario modeling analysis. *Mineral Economics*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s13563-025-00588-6>
- Sudiana, D. R. S., Dermawan, W., & Lanti, I. G. (2025). Transformation of Indonesia's trade policy on nickel commodities. *Ilomata International Journal of Social Science*, 6(4), 1438–1450. <https://doi.org/10.61194/ijss.v6i4.1863>
- Szurliés, M., & Vasters, J. (2024). *The importance of Indonesia for the global nickel market* (Commodity TopNews No. 71). Federal Institute for Geosciences and Natural Resources.
- Tritto, A. (2023, April 11). *How Indonesia used Chinese industrial investments to turn nickel into the new gold*. Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/research/2023/04/how-indonesia-used-chinese-industrial-investments-to-turn-nickel-into-the-new-gold>
- U.S. Geological Survey. (2025). *Mineral commodity summaries 2025* (Version 1.2). <https://doi.org/10.3133/mcs2025>
- Van der Westhuizen, J. (1998). South Africa's emergence as a middle power. *Third World Quarterly*, 19(3), 435–455. <https://doi.org/10.1080/01436599814334>
- Walker, R., & Palaon, H. (2025, March 4). *The future of Indonesia's green industrial policy*. Lowy Institute. <https://www.loyyinstitute.org/publications/future-indonesia-s-green-industrial-policy>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Womack, B. (2016). Asymmetric parity: US–China relations in a multinodal world. *International Affairs*, 92(6), 1463–1480. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12754>
- Yanow, D. (2000). *Conducting interpretive policy analysis*. SAGE.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.